



## Efek Pasca-Pencabutan PPKM di Pedesaan : Studi Kasus Tentang Perspektif Sosial Dan Kesehatan di Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima

Muammar Iksan <sup>1</sup>, Irdansyah <sup>2</sup> Kaharuddin <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Gizi, Universitas Muhammadiyah Bima

Email: [muammariksan31@gmail.com](mailto:muammariksan31@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: [irdansyah1996@gmail.com](mailto:irdansyah1996@gmail.com)

Email: [muammariksan31@gmail.com](mailto:muammariksan31@gmail.com)

<sup>3</sup> Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: [kaharuddin@unismuh.ac.id](mailto:kaharuddin@unismuh.ac.id)

---

**Abstract.** *The aim of the research is to determine the reasons and social-health impacts of lifting social restrictions and the role of the government. The qualitative research method is phenomenology type to understand the social situation around it from people's experiences. Collecting data through observation, interviews, and documentation. Purposive sampling technique for determining research respondents from the perspective of government and society. The validity and credibility of the data were validated using source triangulation techniques. Data analysis starts from the collection stage, data selection or coding, data analysis, final conclusion stage. The results showed that social restrictions were lifted because they limited the economy, Covid numbers were decreasing, people were free to do their activities, health services were starting to maximize and seek treatment freely even though the facilities were lacking, assistance from the government such as direct cash assistance, groceries and social assistance.*

**Keywords:** *After the Repeal of Ppkm; Social; Health*

---

**Abstrak.** *Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan serta dampak sosial-kesehatan pencabutan pembatasan sosial dan peran pemerintah. Metode Penelitian kualitatif berjenis fenomenologi untuk memahami situasi sosial disekitar dari pengalaman masyarakat. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik purposive sampling untuk penentuan responden penelitian dari perspektif pemerintah dan masyarakat. Keabsahan dan kredibilitas data divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data mulai tahap pengumpulan, penyeleksian data atau coding, analisa data, tahap kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan pembatasan sosial dicabut karena membatasi ekonomi, angka covid menurun, masyarakat bebas beraktivitas, pelayanan kesehatan mulai maksimal dan berobat dengan bebas meski sarana-prasarana kurang, bantuan dari pemerintah seperti Bantuan langsung tunai, Sembako dan Bantuan sosial.*

**Kata Kunci :** *Pasca Pencabutan Ppkm; Sosial; Kesehatan*

---

### PENDAHULUAN

Covid 19 menjadi katastrofi yang sangat berbahaya dan merebak secara fluktuatif pada skala global di abad 21 (Chakraborty & Maity, 2020); menimbulkan kekhawatiran dari semua orang dengan lonjakan kasus positif yang begitu cepat menyerang spesies, serta berdampak pada psikologi manusia sejak awal munculnya pandemi yang terdeteksi di Tiongkok (Mustafa et al., 2022; Wilson et al., 2020). Untuk konteks kesehatan, De et al. (2023) mengatakan dalam analisisnya bahwa hal tersebut menyebabkan banyak pasien rawat inap meninggal. Itu menjadikan pandemi sebagai wabah global dengan ketidaksiapan dunia menghadapinya dan membuat setiap negara membatasi hampir seluruh aktivitas serta pergerakan manusia, terutama warga Tiongkok untuk mencegah penyebaran

serta penularannya. Dalam kasus ini, termasuk Indonesia. Pandemi secara nyata memberikan pengaruh pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial sejak akhir tahun 2019 (Gibson & Olivia, 2020). Dampak tersebut mempengaruhi hampir seluruh wilayah Indonesia di sektor ekonomi, sosial, dan kesehatan sehingga sebagian besar aktivitas dibatasi (Mawar et al., 2021). Di tengah penyebaran covid 19 – Negara-negara maju menerapkan kebijakan *lockdown* penuh, semua wilayahnya disolasi agar penyebaran virus berkurang, segala aktivitas dan mobilitas masyarakat diberhentikan secara total. Presiden Jokowi memberikan pernyataan penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai respon, serta langkah pemerintah menghadapi ancaman berdasarkan UUD No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagai dasar hukum kebijakan pemberlakuan di Indonesia (Indiati, 2022).

Keputusan pemerintah menetapkan lockdown, sebagian besar, dianggap sebagai penyebab hilangnya berbagai sumber pendapatan dan pekerjaan warga Negara. Kondisi lain dalam pandangan (Suhendri et al., 2022) yang mengemuka di tengah pandemi adalah kepekaan dan kesadaran sosial berkurang, atau dikurangi oleh peraturan yang diberlakukan selama pppkm berlangsung; selain itu, insentif bagi masyarakat berdampak pppkm menurun serta banyak ketidak setaraan dalam pelayanan kesehatan yang jelas terlihat (Miller & Jr, 2022).

Penerapan PPKM (sekitar 3 hingga 20 juli 2021) sebagai langkah awal pencegahan, terutama untuk pulau Jawa dan Bali sebagai salah dua penyumbang kasus terbesar, di mana penerapan PPKM masih diperpanjang sampai ± Desember 2022. Namun prakteknya kurang efektif bagi skala desa (Wiradinata, I., P. et al., 2022); atau kota besar lain (Pribadi, Frita., 2022); bahkan dinilai tidak berhasil (MS & Rizaldi, 2020). Dalam penelitian Astuti & Musfiroh, (2022) PPKM diklaim diberlakukan selama keadaan darurat dengan pembatasan mobilitas nasional meski di beberapa daerah kurang efektif; tapi secara nyata mengurangi penyebaran virus (Wang et al., 2020). Dan mulai Januari 2023 Indonesia resmi mencabut penerapan PPKM dengan pertimbangan daya imunitas tinggi setelah vaksinasi dilakukan (Hart et al., 2023).

Situasi kecamatan wera saat pandemi dan pasca pencabutan PPKM tidak terlalu berdampak seperti kota-kota besar, meskipun pada tahun 2021 pegawai puskesmas wera positif covid-19 setelah swab tes massal diduga kontak dengan pasien positif. Kebijakan PPKM mengharuskan warga ke luar daerah melengkapi syarat perjalanan, bagi masyarakat desa itu mempengaruhi secara psikologi dianggap merepotkan. Secara sosial masyarakat mengurangi interaksi, khawatir penularan covid-19 serta kesadaran penyebarannya (Napitu et al., 2020; Wahyudiyono et al., 2021). pencabutan pembatasan sosial masyarakat bisa mengadakan kegiatan mengundang massa dengan protokol kesehatan tidak ketat, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setelah merosot saat pembatasan sosial karena mereka tidak bekerja secara maksimal. Di sektor usaha mikro kecil menengah turut merasakan dampaknya pada proses jual-beli (Lina Ayu Safitri, 2021); sebab minat beli warga menurun mempengaruhi ekonomi keluarga (Nuraeny et al., 2021). Kekhawatiran warga akan pandemi masih memberikan efek psikologis meskipun kasus positif di desa sangiang masih nihil, tim covid memeriksa saat keluar masuk desa bagi yang bepergian, hal tersebut menurut Nawangsari et al. (2021) masyarakat turut berpartisipasi mencegah covid, dan mengetahui bahaya pandemi (Napitu et al., 2020); aktivitas di kantor desa sebelum masuk wajib pakai masker, cuci tangan dan menjaga jarak duduk mewaspadai covid 19 (Dabella Yunia et al., 2021).

Meskipun PPKM tidak terlalu berdampak, secara sosial, ekonomi, mereka masih bisa bekerja mencari makan dengan berjualan dalam lingkungan desa sangiang, masyarakat berprofesi pelaut merasakan dampak sebab untuk menjual muatan kapal ke flores atau ke sulawesi dibatasi semenjak pandemi menjalani protokol covid-19 di pelabuhan tujuannya oleh tim covid setempat, menurut Mediyastuti Sofyan et al. (2021) upaya pencegahan virus. Perubahan tidak terlalu signifikan, protocol kesehatan mengikat pelaku perjalanan, meski vaksin merata sedikit memberi rasa aman (Wahyudiyono et al., 2021); kebijakan pemerintah belum memberikan kepastian nyata tentang sosial dan kesehatan jangka panjang. Rumusan masalah: Apa alasan pemerintah mencabut PPKM ? bagaimana dampak sosial dan kesehatan pasca pembatasan sosial ? dan apa peran dan upaya pemerintah pasca PPKM dicabut?. Tujuan dari penelitian ingin mengetahui alasan pemerintah

Indonesia mencabut PPKM, untuk mengetahui dampak sosial dan kesehatan bagi warga desa sangiang, dan mengetahui peran dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan dampak pandemi sampai pasca PPKM.

## METODE PENELITIAN

Kami menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi Edmund Husserl (Reiners, 2012); untuk memahami situasi sosial disekitar dari pengalaman individu, kelompok tentang perspektifnya atau sudut pandang masyarakat, peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian guna menangkap konstruksi atas realitas objek studi. Penelitian ini berfokus pada pencabutan ppkM oleh pemerintah, dampak sosial serta kesehatan pascanya, kemudian upaya pemerintah desa setelah dicabutnya PPKM.

Teknik penentuan responden penelitian Purposive sampling antara lain: Kepala Camat, Kepala Desa, Pendamping Desa, BPD, masyarakat di luar pemerintahan dengan profesi beragam yang merasakan dampak covid-19 sampai pasca PPKM. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara sistematis, observasi, dokumentasi, dan Kuesioner Essay berupa pertanyaan yang disebarakan lewat platform media sosial sasarannya penduduk Desa Sangiang pada umumnya.

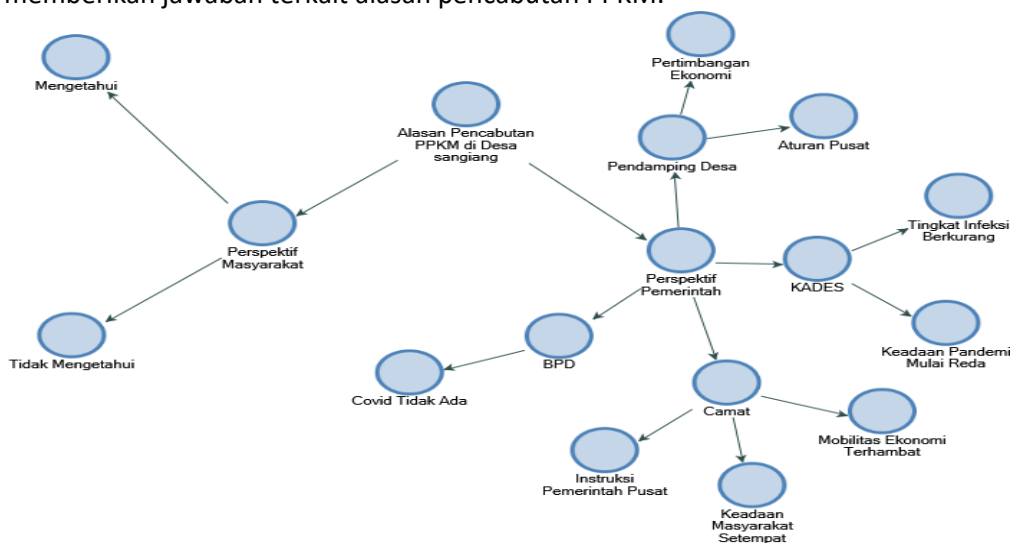
Analisis data mulai tahap pengumpulan, penyeleksian data atau coding, analisa data, tahap kesimpulan akhir penyajian hasil secara naratif, pada proses mengolah data peneliti dibantu Software Nvivo 12 Plus untuk mendapatkan hasilnya (Wahyudin & Ismayanti, 2020), validasi data teknik triangulasi sumber tetap dilakukan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. HASIL PENELITIAN

#### Alasan Pencabutan PPKM di Desa Sangiang

Jawaban reponden dalam analisis peneliti terkait variabel “Alasan Pencabutan PPKM di Desa Sangiang” cukup variatif. Namun secara umum, pada dasarnya dapat diklasifikasi ke dalam dua kategori besar: Perspektif Pemerintah dan Masyarakat. Seperti akan diperlihatkan oleh gambar 1 – dari perspektif Masyarakat, hasil wawancara dari para responden yang diwakili oleh domain ini tidak begitu variatif dan hanya berkisar pada kriteria: mengetahui dan tidak mengetahui. Sementara jenis respon yang lebih beragam peneliti peroleh dari perspektif pemerintah, di mana beberapa domain yang termasuk dalam kategori Pemerintah seperti: BPD, Kepala Desa, Pendamping Desa, dan Camat banyak memberikan jawaban terkait alasan pencabutan PPKM.



Gambar 1. Alasan pencabutan PPKM  
Sumber : Pribadi

Beberapa variasi jawaban yang peneliti peroleh dari para responden, khususnya dari domain pemerintah seperti terlihat pada visualisasi di atas. Secara eksplisit - SFL sebagai pendamping desa dan tenaga ahli sekaligus responden penelitian misalnya, dalam keterangan yang ia berikan terkait alasan pencabutan PPKM mengatakan:

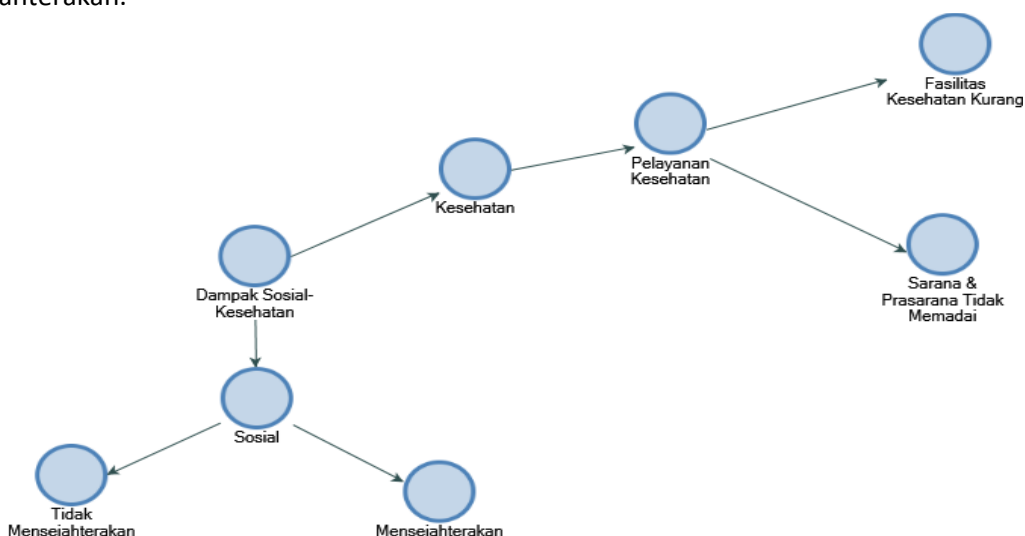
“PPKM ini harus dicabut karena kalau begitu situasinya bisa berdampak di faktor ekonomi. Pembatasan ini memang berat karena orang jadinya berpikir ke mana mana harus pake surat ini surat itu, secara psikologi merepotkan. Jadi faktor terbesarnya memang karena covid 19 sudah turun”

Kebijakan PPKM berdampak pada situasi ekonomi masyarakat, aktivitas dibatasi karena pandemi, ke luar daerah harus melengkapi syarat administrasi bagi pelaku perjalanan menyulitkan aktivitas, penyebaran pandemi menurun menjadi alasan terbesar pencabutan pembatasan sosial. Seperti visualisasi di atas hasil jawaban dari perspektif masyarakat, hasil jawaban responden yang diwakili oleh domain ini cukup variatif hanya berkisar pada kriteria: mengetahui dan tidak mengetahui, dari 10 responden masyarakat 2 diantaranya tidak mengetahui pencabutan pembatasan sosial. Pada analisa Agustino, (2020) birokrasi cenderung menganggap remeh penanganan pandemi; pemerintah desa harus memastikan Intruksi Kemendagri sudah disosialisasikan, hal tersebut sebagai upaya adaptasi new normal pasca pencabutan pembatasan sosial.

Terdapat banyak pertimbangan dari pemerintah sebagai alasan pencabutannya PPKM, mulai dari faktor ekonomi melemahkan usaha masyarakat skala kecil dan besar (Herison, 2020); lihat juga (Rahmi et al., 2022); daya beli masyarakat berkurang efek pembatasan aktivitas (Sepfiatin & Mahendra, 2022) dan mobilitas terganggu (Priambudi, Bagus. et al., 2021); pekerja kehilangan sumber penghasilannya (Dindin. & Susanto, 2021); kondisi ini menghambat ekonomi (Nasruddi, 2020). Pada sektor kesehatan penyebaran virus menurun, kasus positif melandai, khususnya di desa sangiang kasusnya belum ada sejak awal pandemi. Pemerintah Desa dan Camat selaku keterwakilan pihak pemerintah pusat untuk pelayanan umum (Pratiwi,. Dian, 2021); mengikuti dan menjalankan perundang-undangan tertuang dalam instruksi Mendagri no 50 dan 51 Tahun 2022 tentang pencabutan kebijakan PPKM.

### Dampak Sosial dan Kesehatan Pencabutan PPKM di Desa Sangiang

Hasil jawaban responden penelitian dalam analisis terkait variable “Dampak Sosial-Kesehatan sangat variatif, secara umum dapat diklasifikasi ke dalam dua kategori besar: Dampak Sosial dan Kesehatan, seperti akan diperlihatkan oleh gambar 2 dari dampak sosial hasil jawaban para responden pada domain ini tidak begitu variatif, hanya menunjukkan: Tidak Mensejahterakan Dan Mensejahterakan.



Gambar 2. Dampak Sosial dan Kesehatan  
Sumber : Pribadi

Beberapa variasi jawaban yang peneliti peroleh dari para responden, seperti gambar 2 di atas, dari child notes mensejahterakan secara jelas -SHR sebagai BPD sekaligus responden ahli penelitian, dalam keterangan yang ia berikan terkait dampak sosial pasca pencabutan pembatasan mengatakan:

“Ada secara signifikan karena masyarakat punya peluang untuk berkomoditif kemana - mana”  
Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berdagang ke luar daerah tanpa dibatasi mobilitasnya, pendapatan pekerjaan meningkat, mayoritas warga sangiang berprofesi sebagai nelayan, pelaut dan pedagang di luar daerah. Seperti pada visualiasasi di atas ada klasifikasi tidak mensejahterakan misal hasil jawaban responden mengatakan ‘tidak’. Pada aspek kesehatan dampak yang terjadi pasca pencabutan PPKM gambar 2 di atas jawaban para responden variatif pada pelayanan kesehatan meliputi :Fasilitas kesehatan kurang, sarana dan prasarana tidak memadai, responden menjawab “Ya” “Tidak” pada pelayanan kesehatan.

Pasca pencabutan PPKM membuat aturan interaksi sosial telah mengubah nilai dan norma sosial budaya masyarakat, penyebaran informasi tentang pandemi mempengaruhi perubahan kebiasaan (Tjahjadi et al., 2023); perubahan pola interaksi dapat diamati pada aktivitas kehidupan sehari-hari pasca pencabutan batasan sosial (Widyatwati, 2022). Seperti memakai masker, rajin mencuci tangan dan mengadakan pernikahan. Dan mobilitas antar wilayah leluasa tanpa khawatir pemeriksaan seperti sebelumnya menjadikan ruang interaksi sosial bahkan pelayanan kesehatan paling berefek (Mawar et al., 2021). Kegiatan mengundang kerumunan bebas dilakukan tanpa protocol kesehatan ketat.

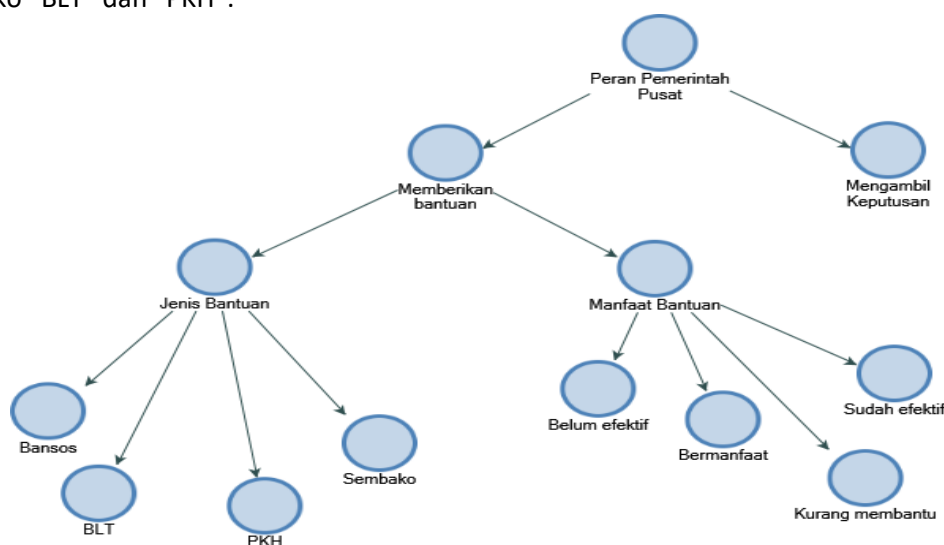
Pada sektor sosial ekonomi mulai menunjukkan peningkatan kesejahteraan warga, pemulihan sosial serta perbaikan finansial rusak saat pandemi (James, 2020; Sparrow, et al., 2020); dan ketimpangan sosial serta kemiskinan diperparah covid-19 (Suryahadi et al., 2020). Pasca ruang gerak tidak lagi batasi (Stanesby et al., 2023); untuk penanganan pandemi., ekonomi yang merosot mempengaruhi jual beli bahan makanan berdampak penurunan imun (Maulidia et al., 2022); kini perlahan mulai tumbuh, adaptasi new normal kehidupan berjalan baik pasca PPKM. Ada pendapat beberapa responden bahwa tidak mensejahterakan sebab masyarakat di desa masih menjalankan aktivitas maupun rutinitas seperti biasanya meski ketika ada pendatang luar daerah, masyarakat membatasi interaksi sosial secara personal (Crawford, F. et al., 2022); lihat juga (Wei et al., 2023); tidak seperti masyarakat kota mobilitasnya tinggi, namun tetap memakai masker karena menjadi kebiasaan selama pandemi.

Keberadaan Pustu di desa sangiang sebagai tempat pelayanan kesehatan masih kurang memadai, bahkan fasilitas kesehatannya masih minim untuk memberikan pelayanan memadai (Mulyati. et al., 2023). Kelengkapan alat medis untuk kesehatan warga desa, tenaga medis serta obat-obatan kurang, dan paling penting tidak tersedianya ambulance desa. Selain pustu desa memiliki polindes melayani kesehatan ibu hamil, menurut Hazfiarini et al. (2022) persalinan bagus ditentukan sarana dan prasarana memadai, kesulitan fasilitas bagus di daerah seperti desa (Herwansyah et al., 2023); mengharuskan ibu hamil memeriksa kandungan di puskesmas dengan USG, bahkan sekarang diwajibkan melahirkan di puskesmas.

Puskesmas kecamatan wera sebagai pusat kesehatan masyarakat masih kekurangan sumber daya dokter ahli, dan kebutuhan obatnya masih terbelang standar sesuai penyakit ringan pada umumnya. Pelayanan vaksinasi covid-19 dari puskesmas kepada masyarakat menjadi prioritas, dan diwajibkan kunci melawan pandemi (Szanyi et al., 2023) lihat juga (Yong et al., 2022) vaksinasi tinggi untuk strategi endemi; sekarang warga bisa datang memeriksa kesehatan dan berobat dengan bebas secara aman, tenaga kesehatan memberikan pelayanan secara maksimal, meski sarana dan prasarana tidak memadai untuk diakses oleh masyarakat di desa karena keterbatasan alat medis untuk penyakit serius dan penanganan pasien covid jika ada mengharuskan rujuk rumah sakit di kota, kesadaran untuk menjaga kesehatan menjadi jauh lebih tinggi dari sebelum adanya wabah pandemi menjadi kebiasaan, mengingat virus masih ada di sekitar mungkin suatu waktu bisa terjangkit sehingga pemerintah memperhatikan harus fasilitas pelayanan kesehatan di desa.

### Peran Pemerintah dalam pencabutan PPKM di Desa Sangiang

Terdapat berbagai pernyataan dari hasil wawancara dan kuesioner esai peneliti bersama para responden, pemodelan sederhana yang peneliti klasifikan sesuai hasil jawaban responden pada gambar 3 - perlu diperhatikan setidaknya ada 2 dua hal termasuk bagian (*child nodes*) penting pada peran pemerintah pusat (*parent nodes*) yang telah peneliti kelompokkan dari peran pemerintah antara lain: 1) Mengambil keputusan; 2) Memberikan bantuan ( Jenis bantuan berupa PKH, Bansos, BLT, Sembako dan Manfaat bantuan terdiri dari belum efektif, bermanfaat, kurang membantu, dan sangat efektif). Maka bisa dikatakan pemerintah pusat berperan penting dalam membantu masyarakat terdampak covid dengan kebijakan dan membantu sosial ekonomi saat pandemi serta pasca pandemi. Adapun hasil jawaban dari responden seperti” memberikan bantuan sosial” sembako” BLT” dan “PKH”.



Gambar 3. Peran Pemerintah  
Sumber : Pribadi

## 2. PEMBAHASAN

Berkaitan dengan peran pemerintah dalam upaya membantu masyarakat terdampak pandemi dengan member berbagai jenis bantuan, dari hasil jawaban responden RBS mengatakan :

“Ada Bentuk uang dari desa BLT, dan ada sembako dari provinsi”

Pada penjelasan responden RBS - pemerintah provinsi memberikan bantuan berupa paket sembako kemudian dari pemerintah desa ada BLT dari anggaran dana desa bagi yang membutuhkan sesuai syarat penerimanya, untuk implementasinya bantuan belum efektif membantu masyarakat. Sesuai visualisasi di atas bahwa jawaban responden berkisar antara: “Belum efektif”, “bermanfaat”, “kurang membantu”.

Pemerintah pusat memberikan bantuan berupa Bansos merupakan singkatan dari bantuan sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial, maka pemerintah membuat kebijakan pemberian bantuan sosial. Menurut (Mikhael et al., 2021) pada artikelnya kebijakan ini merupakan produk dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 (Perppu 1/2020) yang selanjutnya dalam hal pendanaan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.02/2020 dan Peraturan Menteri Kebijakan No. 43/PMK.05/2020; lihat juga (Mikhael et al., 2021); dengan harapan lepas dari resiko kemiskinan dampak pandemi.

Pemerintah Desa menggunakan Anggaran Dana Desa untuk penanganan pandemi atas instruksi pemerintah pusat dengan membeli segala kebutuhan pencegahan covid di desa alat kesehatan, dan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) menurut Chumairo & Ulum, (2021) adalah bentuk kerjasama pemerintah membantu warga terdampak covid. Penerima bantuan diputuskan



melalui Musdes sesuai kriteria misal kehilangan pekerjaan (Habibah & Rosyda, 2022): penerima tidak terima bantuan lain (Ikmal & Noor, 2021); keterbukaan informasi dinilai efektif membantu lewat Musdes (A, Nimrah., R. et al., 2022). Pada awal pandemi diberikan Rp.900.000 selama 4 bulan dengan skema 2 kali pencairan, kemudian ada perubahan nominalnya jadi Rp.600.000 3 bulan sekali, setelah itu pada tahun 2023 jumlahnya menurun Rp. 300.000 diperuntukan bagi miskin ekstrem pasca pandemi disebut BLT Ekstrem dari pemerintah Desa (Sparrow et al., 2020); bantuan bermanfaat meningkatkan daya beli. Pada proses penyalurannya masih ditemukan masalah tidak tepat sasaran pemerintah desa serta kurang selektif (Firmansyah, W. & Fanida, Eva., 2022); bahkan terjadi kecemburuan sosial (Saroh, A. & Panjaitan, R., 2021).

Selain bantuan langsung tunai ada PKH program bantuan sosial keluarga miskin, untuk peningkatan sumber daya manusia bidang pendidikan dan kesehatan (Sofia & Aji, 2022); dari pemerintah sebelum adanya pandemi sampai pasca PPKM program dinilai bermanfaat bagi penerimanya karena membantu keluar resiko kemiskinan. Namun pelaksanaannya ditemukan masalah pendataan database yang kurang update di lapangan oleh pendamping, misal dari penerima bantuan yang tidak tepat sesuai kriteria, warga menganggap kurang membantu sebab biaya hidup dengan nominal bantuan tidak cukup. Kemudian pada analisis Sofia & Aji (2022) menimbulkan kerawanan korupsi saat penyaluran bantuan tunai ditransfer ke ATM penerima tapi kartu dan buku rekening dipegang oleh agen bank kerja sama dengan pendamping; ini akan menimbulkan masalah dan kecurigaan.

Bantuan lain dari Dinas Sosial Kabupaten yaitu bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa bahan pangan membantu warga yang terbatas mobilitas sosial dan daya beli berkurang serta meringankan beban masyarakat miskin; syaratnya tidak menerima bantuan lain (Khoiriyah et al., 2020). Persoalan bantuan belum efektif pelaksanaannya tidak sesuai dengan keperluan hidup, penyaluran bantuan dan penerima bantuan tidak tepat sasaran, menjadikannya kurang efektif dan potensi penyelewangan ada (Nasrullah, M. & Annisa, 2021).

## KESIMPULAN

Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa alasan pencabutan PPKM oleh pemerintah karena membatasi aktivitas serta mobilitas masyarakat yang ingin bepergian ke luar daerah berdampak ekonomi tidak berkembang, kasus pasien positif covid 19 berkurang. Adapun dampaknya pasca pencabutan kebijakan tersebut aktivitas warga kembali normal tanpa khawatir pandemi, masyarakat bisa kembali bekerja, pada aspek kesehatan meski fasilitas kesehatan kurang memadai tapi untuk pelayanan kesehatan masyarakat bisa memeriksa dan berobat secara aman serta bebas tanpa khawatir penularan virus. Pemerintah memberikan berbagai jenis bantuan bagi masyarakat terdampak covid 19 sesuai kriteria penerima sejak awal pandemi sampai pascanya, bantuan berupa BLT, PKH, Bansos dan Sembako, pemberian bantuan dinilai sangat bermanfaat bagi penerimanya meski dalam pelaksanaannya masih ditemukan masalah tidak tepat sasaran, rawan dikorupsi, dan bantuan tidak mampu mensejahterakan bahkan belum cukup memenuhi kebutuhan penerimanya. Peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk bisa meneliti di kecamatan atau Kota/Kabupaten agar hasilnya lebih variatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Nimrah., R., Y., Hidayat, R., & Djabbar, .Isra. (2022). Kemampuan Desa Dalam Mengelola Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Secara Akuntabel. *Jurnal Neo Societal*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.52423/jns.v7i1.21029>
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 : Pengalaman Indonesia Analysis Of Covid-19 Outbreak Handling Policy : The Experience Of Indonesia. *Jurnal Boneo Administrator*, 16(2), 253–270. <https://doi.org/10.2458/jba.v16i2.685>
- Astuti, S. B., & Musfiroh, T. (2022). Critical Discourse Analysis Online News “ PPKM Darurat Jawa-Bali Diterapkan 3-20 Juli , Apa Bedanya dengan PPKM Mikro dan PSBB ” Using Teun A . van Dijk Model. *Proceedings of the 1st World Conference on Social and Humanities Research (W-SHARE*

- 2021), 654, 168–173. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.
- Chakraborty, I., & Maity, P. (2020). COVID-19 outbreak : Migration , effects on society , global environment and prevention Machine Translated by Google. *Science of the Total Environment*, 728, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138882>
- Chumairo, N., & Ulum, A. W. (2021). Analisis Penanganan Wabah COVID-19 dalam Perspektif Model Collaborative Governance ( Studi Kasus pada Desa Karang Rejo , Kecamatan Purwosari , Kabupaten Pasuruan ). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 179–185. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2260>
- Crawford, F., W., Jones, Sydney., A., Cartter, M., Dean, S. G., Warren, J. L., Li, Z., R., Barbieri, J., Campbell, J., Kenney, P., Valleau, T., & Morozova, O. (2022). Impact of close interpersonal contact on COVID-19 incidence : Evidence from 1 year of mobile device data. *SCIENCE ADVANCES | RESEARCH ARTICLE CORONAVIRUS*, 5499(January), 1–11.
- Dabella Yunia, Gandakusumah, N. S. S., Zahra, N. S., Musdalifah, Fajrianti, F., Putra, H. D., Ashri, F., & Qunnisa, I. (2021). Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap Covid-19 pada masa PPKM di Kelurahan Cibodasari. *Panrannuangku Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 44–50. <https://doi.org/10.35877/panrannuangku487>
- De, G. M., Reyne, A. G., Lora-tamayo, J., Mui, A., Martínez, M. A. C., Rivera, N. A., Garcia, E. O., Moreno, B. S., Castro, S. J. F., Rhyman, N., Fontan, P. M. P., Piles, L., Caley, J. F. L., Villarejo, M. E. F., Jiménez-garcía, N., Boixeda, R., Santos, J. M. A., Bermejo, C. L., & Network, S.-. (2023). Impact of days elapsed from the onset of symptoms to hospitalization in COVID-19 in-hospital mortality : time. *Revista Clínica Española*, 223, 281–297. <https://doi.org/10.1016/j.rceng.2023.03.006>
- Dindin., & Susanto, H. (2021). Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 91–93.
- Firmansyah, W., I., & Fanida, Eva., H. (2022). Efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa (blt-dd) kepada masyarakat terdampak covid-19 di desa kepatihan kabupaten jombang. *Publika*, 9(5), 261–272. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p261-272>
- Gibson, J., & Olivia, S. (2020). Direct and Indirect Effects of Covid-19 On Life Expectancy and Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 325–344. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1847244>
- Habibah, U., & Rosyda, M. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Langsung Tunai. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 6(1), 404–413. <https://doi.org/10.30865/mib.v6i1.3471>
- Hart, R. J., Baumer-mouradian, S., Bone, J. N., Olson, P., Schroter, S., Weigert, R. M., Chung, S., Shah, P., Lunoe, M. M., Evers, M., Nelson, C. E., Goldman, R. D., Attitude, C.-P., & Covipas, S. (2023). Factors associated with US caregivers ' uptake of pediatric COVID-19 vaccine by race and ethnicity. *Vaccine*, 41(15), 2546–2552. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.02.080>
- Hazfiarini, A., Rana, Zahroh., I., Akter, S., Homer, C. S. E., & Bohren, M. A. (2022). Indonesian midwives ' perspectives on changes in the provision of maternity care during the COVID-19 pandemic : A qualitative study. *Midwifery*, 108, 103291. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103291>
- Herison. (2020). Dampak ekonomi pembatasan sosial berskala besar terhadap masyarakat kota pekanbaru di provinsi riau. *Dampak Ekonomi Pembatasan Sosial Berskala Besar terhadap Masyarakat Kota Pekanbaru Di Provinsi Riau*, 11(2), 164–173. <https://doi.org/10.3697/jeb.v11i2.269>
- Herwansyah, H., Czabanowska, K., & Bäck, Peter., S. (2023). Barriers and facilitators to the provision of maternal health services at community health centers during the COVID-19 pandemic : Experiences of midwives in Indonesia. *Midwifery*, 123, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103713>
- Ikmal, N. M., & Noor, M. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Perekonomian Masyarakat Pada Kondisi Pandemi. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Peran*



- Perempuan Sebagai Pahlawan Di Era Pandemi," 8(1), 312–327.  
<https://doi.org/10.38156/gesi.v8i1.96>
- Indiati. (2022). Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1–7. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- James, J. J. (2020). COVID-19 : Reflections. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 14(6), 8–11. <https://doi.org/10.1017/dmp.2020.191>
- Khoiriyah, F., Oktavia, L., Zakiyah, N., & Huda, M., A., I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik*, 15(2), 97–110.  
<https://doi.org/10.2961/sp.v15i2.43501>
- Lina Ayu Safitri, C. B. D. (2021). Analisa Kebijakan Pemberlakuan Ppkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Industri Skala. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 23(2), 97–107.  
<https://doi.org/10.23917/dayasaing.v23i2.16180>
- Maulidia, A., Angraini, D. I., & Sutarto. (2022). Hubungan Antara Asupan Imunonutrisi dengan Status Imunitas Relationship Between Immunonutrition Intake With Immunity Status Post- Covid-19 Pandemic. *Medula*, 13(1), 185–190. <https://doi.org/10.53089/medula.v13i1.622>
- Mawar, Andriyani, L., Gultom, A., & Ketiara, K. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1–12. e: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit%0AE-ISSN:2745-6080>
- Mediyastuti Sofyan, M., Abdussalam, A., Sabila Arifin, A., Yuda Pratama, D., & Hapid, F. (2021). Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Identitas*, 1(2), 62–73. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.156>
- Mikhael, L., Nursanty, R., Y., I., & Hananto, R. (2021). Tinjauan Konstitualitas dan Studi Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial. *Jaminan Perlindungan Hak Konstitusional Dan Implementasinya Di Masa Pandemi Covid-19*, 7(1), 1–36. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.707>
- Miller, D. S., & Jr, R. J. T. (2022). COVID-19 and health inequalities : lessons for pandemic disasters yet to come. *Sociological Spectrum :Mid-South Sociological Association*, 42(3), 157–161.  
<https://doi.org/10.1080/02732173.2022.2085639>
- MS, Z. H., & Rizaldi, A. (2020). Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 36–53. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>
- Mulyati., Suryoputro, A., & Martini, Rina. (2023). Kesiapan Rumah Sakit untuk Pandemi Covid-19 : Literature Review Hospital. *MPPKI Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia The Indonesian Journal of Health Promotion*, 6(5), 850–859.  
<https://doi.org/10.56338/mppki.v6i5.3376>
- Mustafa, S., Ahmed, J., Awadelgeed, B. A., & Miskeen, E. (2022). Assessing the Psychological Impact of the Pandemic COVID -19 in Uninfected High-Risk Population. *Journal of Multidisciplinary Healthcare ISSN:*, 15, 391–399. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S350306>
- Napitu, U., Corry, C., & Matondang, K. D. (2020). Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Mikro Di Kelurahan Bah Kapul. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 232–241. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1698>
- Nasruddi. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah □. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 7(7), 639–648.  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>
- Nasrullah, M., A., & Annisa, R. (2021). Analisis Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanah Laut Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 4(2), 95–101.  
<https://doi.org/10.34128/jra.v4i2.65>
- Nawang Sari, Rining, E., Rahmadani, Ardha, W., Firmansyah, Nosa., Y., & Zachary, Yovi, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5),

- 593–605. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.270>
- Nuraeny, R., Nur Azizah, S., & Nur Salam, A. (2021). Apakah Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Berpengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang Di Kebumen. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(9), 1627–1639. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i9.236>
- Pratiwi, Dian, K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum V*, 3(1), 37–52. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.929>  
Submitted:
- Priambudi, Bagus., N., Ariani, N., M., Wijaya, M., I., H., & Pradana, Bian. (2021). Pengaruh Kebijakan PPKM Tahap II Jawa Tengah Terhadap Mobilitas Penduduk Pada Sektor Retail dan Rekreasi The Effect of PPKM Phase II Central Java Policy on Population Mobility in the Retail and Recreation Sectors. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 189–194. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.904>
- Pribadi, Frita., A. (2022). Implementation of an Emergency Community Restriction Policy ( PPKM Darurat ) for COVID-19 Mitigation in Surabaya. *KnE Social Sciences*, 2022, 89–100. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10542>
- Rahmi, Z., Rozalinda., & Wira, A. (2022). Ancaman Dampak Pemberlakuan Ppkm Terhadap Perekonomian Dan Perkembangan Umkm Kota Padang. *Journal Al-Ahkam*, XXIII(1), 19–34.
- Reiners, G. M. (2012). Memahami Perbedaan antara Husserl ( Deskriptif ) dan Penelitian Fenomenologis ( Interpretif ) Heidegger Jurnal Keperawatan dan Perawatan. *Journal Nurs Care*, 1(5), 1–3. <https://doi.org/10.4172/2167-1168.1000119>
- Saroh, A., Z., & Panjaitan, R., P. (2021). Desa Terdampak Covid-19 : Menilik Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( Blt-Dd ). *Jurnal Administrasi Negara*, 27(2), 110–134.
- Sepfiatin, N., & Mahendra, G. K. (2022). Evaluasi Kebijakan Ppkm Darurat Covid-19 Dalam Perpektif LHKP PP Muhammadiyah. *TheJournalish : Social and Government*, 3(3), 198–206. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.279>
- Sofia, I., & Aji, I. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *JUSTISI / UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG*, 8(2), 95–107.
- Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia Under the New Normal : Challenges and the Way Ahead. *Bulletin of Indonesian Economic Studies ISSN:*, 56(3), 269–299. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>
- Stanesby, O., Greaves, S., Jose, K., Sharman, M., Blizzard, L., Palmer, A. J., Evans, J., Cooper, K., Morse, M., & Cleland, V. (2023). A prospective study of the impact of COVID-19-related restrictions on activities and mobility upon physical activity, travel behaviour and attitudes. *Journal of Transport & Health*, 1–50. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2023.101624>
- Suhendri, H., Andika, P. S., & Risnaningsih. (2022). Critical Ethnography Of Micro Ppkm Policy In The Covid-19 Pandemic: A Study Based On The Perception Of Micro Entrepreneurs. *RJOAS*, 1(3), 72–79. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2022-01.08>
- Suryahadi, A., Izzati, R. Al, & Suryadarma, D. (2020). Memperkirakan Dampak Wabah COVID-19 pada Kemiskinan. *Buletin Of Indonesian Economic Studies*. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Szanyi, J., Wilson, T., Howe, S., Zeng, J., Andrabi, H., Rossiter, S., & Blakely, T. (2023). Epidemiologic and economic modelling of optimal COVID-19 policy : public health and social measures , masks and vaccines in Victoria , Australia. *The Lancet Regional Health - Western Pacific*, 32(3), 100675. <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2022.100675>
- Tjahjadi, B., Soewarno, N., Ismai, W., A., W., Kustiningsih, N., & Nafidah, L., N. (2023). Journal of King Saud University – Science Community behavioral change and management of COVID-19 Pandemic : Evidence from Indonesia. *Journal of King Saud University - Science*, 35(2), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jksus.2022.102451>
- Wahyudin, & Ismayanti, M. (2020). Jurnal nalar pendidikan. *JURNAL NALAR PENDIDIKAN*, 8(2), 104–113. <https://doi.org/10.26858/jnp.v8i2.15258>

- Wahyudiyono, Eko, B. R., & Triskani. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Covid-19 Pasca PPKM ( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ). *Jurnal Komunika:Jurnal Komunikasi Dan Informatika*, 10(2), 102–112. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i2.4484>
- Wang, S., Liu, Y., & Hu, T. (2020). Examining the Change of Human Mobility Adherent to Social Restriction Policies and Its Effect on COVID-19 Cases in Australia. *International Journal of Environmental Research and Public Health Article*, 17(7930), 1–17. <https://doi.org/10.3390/ijerph17217930>
- Wei, R., Zhang, Y., Gao, S., Brown, B. J., Hu, S., & Link, Bruce G. (2023). Health and Place Health disparity in the spread of COVID-19 : Evidence from social distancing , risk of interactions , and access to testing. *Health and Place*, 82(February), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2023.103031>
- Widyatwati, K. (2022). Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19. *Sebatik*, 26(1), 387–395. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i1.1855>
- Wilson, J. M., Lee, J., Shook, N. J., Wilson, J. M., Lee, J., & Covid-, N. J. S. (2020). COVID-19 worries and mental health : the moderating effect of age. *Aging & Mental Health*, 25(7), 1289–1296. <https://doi.org/10.1080/13607863.2020.1856778>
- Wiradinata, I., P., P., Dewi, A., A., S., L., & Suryani, L., P. (2022). Efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(Ppkm) Terhadap Adat Dan Kebiasaan Masyarakat Di Desa Adat Menyali Kabupaten Buleleng. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 383–389. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4841.383-389>
- Yong, B., Hoseana, J., & Owen, L. (2022). From pandemic to a new normal : Strategies to optimise governmental interventions in Indonesia based on an SVEIQR-type mathematical model. *Infectious Disease Modelling*, 7(3), 346–363. <https://doi.org/10.1016/j.idm.2022.06.004>